

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan era *modern* saat ini membuat banyak perubahan terjadi pada kehidupan. Salah satunya adalah dalam proses komunikasi politik yang saat ini sangat berkembang. Menurut Silih Agung Wasesa, kehadiran media baru berbasis digital membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi juga terdistribusi membentuk perbincangan yang “akrab” dengan publik.¹

Media sosial merupakan salah satu wadah atau tempat yang tepat untuk perkembangan komunikasi politik di era *modern* seperti saat ini. Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Implementasinya, media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.² Media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang memiliki peran membawa khalayak umum untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan timbal balik secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respons secara online dalam waktu yang cepat.

Terdapat berbagai macam media sosial yang sekarang ada di masyarakat seperti Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp dan salah satunya adalah Instagram. Media sosial seperti Instagram merupakan media sosial yang sekarang sangat sering digunakan oleh semua kalangan karena tidak hanya menjadi gaya hidup masyarakat tetapi telah menjadi kebutuhan. Media sosial Instagram digunakan sebagai alat komunikasi yang memanfaatkan kode tutur sebagai bahan utama dalam berekspresi dan berinteraksi dengan masyarakat. Instagram juga dimanfaatkan sebagai bentuk

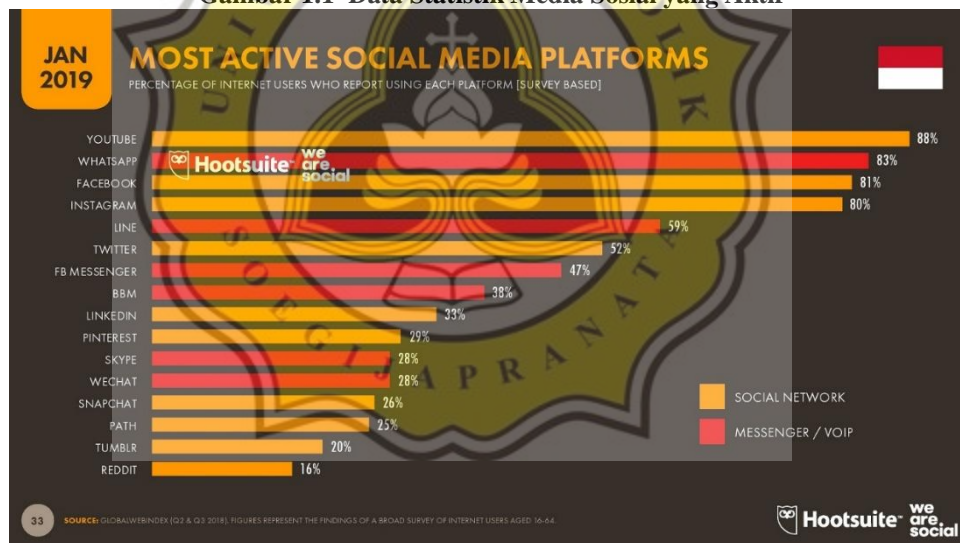
¹ Anshari Faridhian, 2013, “Komunikasi Politik di Era Medi Sosial”, dalam *Jurnal komunikasi*, Vol. 8, No. 1, Oktober: (Jakarta: Staf Pengajar STT PLN), hal 92-93.

² Budiyono, 2016, “Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang PILKADA DKI JAKARTA 2017”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, Oktober: (Yogyakarta: BPPKI), hal 50.

pertukaran informasi, saling berkolaborasi, dan menjalin hubungan pertemanan dalam bentuk tulisan, foto, maupun video.³

Masyarakat Indonesia sendiri terbilang cukup mudah beradaptasi dengan jenis-jenis media sosial. Namun berdasarkan laporan digital tahunan yang dikeluarkan oleh *Hootsuite (We Are Social)* pada Januari 2019, ada lima kanal media sosial yang paling aktif digunakan masyarakat Indonesia yaitu Youtube 88%, Whatsapp 83%, Facebook 81%, Instagram 80% dan Line 59%.⁴ Tetapi tidak hanya terdapat lima kanal media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, terdapat 11 media sosial lainnya yang juga digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Twitter, FB Messenger, BBM, LinkedIn, Pinterest, Skype, Wechat, Spanchat, Path, Tumblr dan Reddit. Berikut ini terdapat data statistik media sosial yang aktif di Indonesia pada tahun 2019 yaitu:

Gambar 1.1 Data Statistik Media Sosial yang Aktif



Sumber : <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>
Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020

³ Eliya Ixsir, Zulaeha Ida, 2017, “Model Komunikasi Politik Ridwan Kamil Di Media Sosial Instagram”, dalam *DIALEKTIKA: jurnal Bahasa, sastra, dan pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia*, Desember: (Bengkulu: IAIN, Semarang: Universitas Negeri Semarang), hal 206.

⁴ “*Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2019*”, andi.link, Januari 2019, diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 02.22 wib.

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan dari pelaku politik kepada masyarakat.⁵ Salah satu tokoh politik di Indonesia adalah kepala negara, Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia 2 periode yaitu pada tahun 2014-2019 dan 2019-2024 melakukan komunikasi politik dengan cara keterbukaan dan keakraban dengan masyarakat serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan kinerja yang dilakukan. Seiring berkembangnya teknologi, kini proses tersebut berkembang secara daring (*online*) melalui media internet. Salah satu media komunikasi berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial.

Media sosial yang aktif digunakan Joko Widodo adalah Instagram. Pada hari Kamis, 28 Januari 2016 malam Joko Widodo memperkenalkan akun resmi media sosial Instagramnya melalui halaman Facebook yang telah terverifikasi. Menurut pantauan *KompasTekno* dalam waktu kurang lebih satu jam setelah diperkenalkan, Instagram Joko Widodo sudah memiliki sekitar 190 ribu *followers* dengan 38 foto yang diunggah mengenai aktivitas sehari-hari, seperti memimpin rapat, menerima tamu kenegaraan, dan kunjungan kerja ke berbagai daerah.⁶ Menurut Ixsir, Instagram digunakan sebagai sarana komunikasi politik yang dilakukan untuk mempermudah dalam memberikan informasi tentang program kerja terbaru, hasil kerja, cara penanganan suatu masalah, bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah pusat, jajak pendapat atau hanya sekedar menyapa masyarakat. Bentuk komunikasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi antara pemimpin dan masyarakat atau pihak tertentu.⁷

Yang menjelaskan bahwa beberapa studi menempatkan media sosial sebagai platform bagi humas dalam menjalankan komunikasi publik. Studi lain menganggap media sosial sebagai sarana untuk menjalankan komunikasi strategis.⁸ Dengan

⁵ Anwar Arifin, 2011, "*Komunikasi Politik: Teori Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal 8.

⁶ "*Ini Akun Resmi Instagram Presiden Jokowi*", *kompas.com*, 29 Januari 2016, diakses pada 14 April 2020 pukul 09.10 wib.

⁷ Eliya Ixsir, Zulaeha Ida, loc.Cit. hal 206-207.

⁸ Widiastuti Rosalita Niken, 2018, "*Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*", (Jakarta: Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika), hal 12.

penggunaan media sosial sebagai salah satu media yang digunakan pemerintah pusat untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo menggunakan politik yang transparan. Joko Widodo menyatakan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat semakin menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, rakyat menginginkan pemerintah yang responsif yang cepat merespons keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Menurut Joko Widodo, berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau *open government*, dengan mengadopsi prinsip pemerintah terbuka atau transparan pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun, memperkuat kepercayaan publik. Joko Widodo berpendapat pemerintahan terbuka memungkinkan rakyat bisa berinteraksi dengan badan-badan publik secara elektronik (*e-government*). Pemanfaatan teknologi informasi dalam interaksi membuat komunikasi bisa dilakukan tanpa harus terhalang jarak dan waktu. Joko Widodo menyampaikan untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, tidak hanya membutuhkan karakter, mentalitas dan pola pikir kalangan birokrasi pemerintah dan badan-badan publik, tetapi juga reformasi sistem dan pola kerja terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau *e-government* mulai dari *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalogue*, *cash flow management system* dan lain sebagainya.⁹

Transparansi dilakukan agar setiap lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses semua informasi yang diadakan, diberikan dan disediakan oleh pemerintah sebagai alat untuk memonitoring, mengevaluasi dan menilai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dibawah pengawasan masyarakat.¹⁰ Transparansi kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo menurut pengamatan tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur namun juga berupa dialog dengan masyarakat. Salah satu proses dialog Presiden Joko Widodo dengan masyarakat adalah pada saat pembagian

⁹ “Jokowi Ingatkan Keterbukaan Informasi Publik”, lipiutan6.com, 15 Desember 2015, diakses pada 28 April 2020 pukul 11.45 wib.

¹⁰ Akhmad, 2016, “Analisa Komperhensif Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, dalam *Ad’ministrare*, Vol. 3 No. 2: (Makassar: Universitas Pejuang Republik Indonesia), hal 31-32.

sertifikat tanah. Pembagian sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program Presiden Joko Widodo untuk menyisir seluruh wilayah terdata melalui mekanisme sertifikasi secara keseluruhan. Langkah ini dilakukan karena dikatakan efektif untuk mengejar target 126 juta bidang tanah di tahun 2024 sudah bersertifikat.¹¹ Menurut Presiden Joko Widodo, semua bidang tanah yang dimiliki masyarakat harus sudah bersertifikat. Langkah itu guna menghindari terciptanya konflik akibat sengketa lahan. Baik yang terjadi antara keluarga, tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan dan sebagainya¹²

Berdasarkan unggahan yang ada di media sosial Instagram @jokowi pada periode 4 Januari 2016 – 23 Maret 2019 terdapat berbagai kegiatan yang sering dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kategorisasi pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan unggahan di media sosial Instagram baik berupa foto, gambar maupun video yaitu:¹³

Table 1.1 Kategorisasi Unggahan Instagram @jokowi

No.	Kategorisasi	Jumlah
1.	Pembangunan Infrastruktur	243
2.	Ucapan	222
3.	Sosial Budaya	180
4.	Ekonomi	98
5.	Rapat Kerja	62
6.	Kunjungan Kenegaraan	50
7.	Menerima Kunjungan Kenegaraan	43
8.	Kehidupan Pribadi	42
9.	Prestasi	42
10.	Bencana	32
11.	Menerima Kunjungan Tamu Dalam Negeri	32
12.	Pertahanan & Keamanan	26
13.	Pendidikan	20
14.	Pelantikan	11

¹¹ “Alasan Jokowi Bagi Sertifikat Tanah Gratis”, detik.com, 26 Maret 2018, diakses pada 29 Maret 2020 pukul 04.20 wib.

¹² “Ini Alasan Jokowi Percepat Penerbitan Sertifikat Tanah kepada Masyarakat”, okezone.com, 25 Januari 2019, diakses pada 29 Maret 2020 pukul 04.24 wib.

¹³ Shafa Sella Ikhwanus, 2019, “Audit Komunikasi Instagram @Jokowi (4 Januari 2016 – 23 Maret 2019)”, dalam *Skripsi Komunikasi*, Oktober: (Semarang: Progdil Ilmu Komunikasi Universitas Soegijapranata), hal 50.

15.	Tenaga Kerja	10
16.	Upacara	10
17.	Pariwisata	8
18.	Kesehatan	5
19.	Lingkungan Hidup	5
	Total	1.141

Sumber : Observasi Instagram @jokowi 4 Januari 2016 – 23 Maret 2019)
pada tanggal 26 Juli 2019

Shafa Sella Ikhwanus, 2019, "Audit Komunikasi Instagram @Jokowi 4 Januari 2016 – 23 Maret 2019), dalam *Skripsi Komunikasi*, Oktober: (Semarang: Progdil Ilmu Komunikasi Universitas Soegijapranata), hal 50.

Pada kolom 1.1 terdapat kategorisasi mengenai pembangunan infrastruktur yang berisikan keterangan mengenai pembagian sertifikat, dalam hal ini pembagian sertifikat tanah dimasukkan ke dalam kategorisasi tersebut karena biasanya pada pembagian sertifikat tanah terdapat hubungan dengan tanah pembangunan pemerintah sehingga hal tersebutlah yang membuat penulis terdahulu memasukan pembagian sertifikat tanah ke dalam kolom kategorisasi pembangunan infrastruktur.

Dalam proses pembagian sertifikat tanah pastinya terdapat dialog yang unik antara Presiden Joko Widodo dengan masyarakat yang menerima sertifikat tersebut. Hasil dialog-dialog atau komunikasi yang beraneka ragam tersebutlah yang menjadi bahan yang akan *diupload* melalui akun Instagram @jokowi untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan program kerja yang ada. Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema Komunikasi Politik Jokowi dalam Pembagian Sertifikat Tanah Melalui Instagram @jokowi.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana proses komunikasi politik dalam pembagian sertifikat tanah pada akun media sosial Instagram @jokowi periode 4 Januari 2016 hingga 23 Maret 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses komunikasi politik dalam pembagian sertifikat tanah pada akun media sosial Instagram @jokowi periode 4 Januari 2016 hingga 23 Maret 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap kajian tentang interaksi atau komunikasi politik terhadap media sosial tokoh politik Presiden Joko Widodo melalui Instagram @jokowi. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terhadap interaksi atau komunikasi politik dan hubungannya dengan penggunaan media sosial.

1.4.2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak terkait, tidak hanya kepada Tim Komunikasi Digital Presiden selaku pengelola Instagram @jokowi, tetapi juga menjadi manfaat bagi penelitian interaksi atau komunikasi politik lainnya.

